

KURIKULUM MERDEKA BERBASIS DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN KESETARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN BULELENG

Ni Putu Ayu Hervina Sanjayanti¹, Ni Wayan Sri Darmayanti², Caecilia Berliningrum³

¹³Universitas Pendidikan Ganesha, ²ITP Markandeya Bali

sanjyantihervina@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this community service is to strengthen the understanding of tutors or teachers at the Community Learning Activity Center (PKBM) in Buleleng Regency in compiling a digital-based independent curriculum. Equivalency Education is non-formal education that includes Package A, B, C programs with an emphasis on mastering knowledge, functional skills and developing students' professional attitudes and personalities. The legal basis for equal education is Government Regulation Number 73 of 1991. Regional governments carry out development of equal education aimed at educational units and citizens who do not have the opportunity to access formal education. Therefore, it is very necessary to assist in the preparation of an independent curriculum for tutors in improving the quality of non-formal education units. The results of this activity are a draft independent curriculum which can then be applied to each PKBM.

Keywords: *independent curriculum, PKBM, digital, Equivalency Education*

ABSTRAK

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menguatkan pemahaman tutor-tutor atau guru Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Buleleng dalam menyusun kurikulum merdeka berbasis digital. Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A,B,C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Dasar hukum pendidikan kesetaraan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. Pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dan warga negara yang tidak berkesempatan akses pendidikan formal. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan pendampingan penyusunan kurikulum merdeka untuk tutor dalam peningkatan kualitas satuan Pendidikan non formal. Hasil dari kegiatan ini berupa draf kurikulum merdeka yang selanjutnya bisa diterapkan pada masing-masing PKBM.

Kata kunci: kurikulum merdeka, PKBM, digital, Pendidikan kesetaraan

PENDAHULUAN

Mereka yang bergerak di dunia pendidikan harus terbiasakan dengan sistem berbasis digital. Pelaku Pendidikan juga mesti melek terhadap IPTEKS. Pun Pemerintah juga sudah menajalankan Program-program untuk peningkatan dan pemerataan Pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah Program Pendidikan Kesetaraan pada PKBM. Salah satunya adalah pendidikan kesetaraan PKBM di Kabupaten Buleleng. Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A,B,C dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan

sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Dasar hukum pendidikan kesetaraan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. Pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan pendidikan kesetaraan yang ditujukan kepada satuan pendidikan dan warga negara yang tidak berkesempatan akses pendidikan formal (Armaya, 2020).

Implementasi kurikulum merdeka (IKM) pada pendidikan kesetaraan tidak begitu jauh dari pendidikan non formal (Kepmendikbud, 2020). Ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait IKM di pendidikan kesetaraan sebagai berikut.

Pertama Kerangka Dasar, yaitu Rancangan landasan utama Kurikulum Merdeka adalah tujuan Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan, serta mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Kedua Kompetensi yang Dituju, terdiri dari dua kelompok mata pelajaran: (1) Kelompok Umum kompetensi yang dituju sama dengan Capaian Pembelajaran untuk Jalur Pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. (2) Kelompok Mata Pelajaran Pembedayaan dan Keterampilan.

Ketiga Struktur Kurikulum, Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri mata pelajaran kelompok umum dan kelompok pembedayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila, Usulan: Muatan Belajar dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui pembelajaran tatap muka, tutorial, dan atau belajar mandiri.

Keempat Pembelajaran, belajar berbasis modul mandiri penuh, atau blended learning (mandiri dan tatap muka/tutorial daring). Keenam Perangkat Ajar yang Disediakan Pemerintah, Dalam bentuk modul yang disusun oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan. Kemendikbudristek menyediakan beragam contoh modul ajar, contoh alur tujuan pembelajaran, dan contoh kurikulum operasional satuan pendidikan yang dapat digunakan di satuan pendidikan atau sebagai inspirasi.

Harapan terkait Pendidikan Kesetaraan tersebut tidak sama dengan yang terjadi di lapangan, khususnya pada Pendidikan Kesetaraan PKBM di Kabupaten Buleleng Bali. Masih banyak PKBM yang belum memahami apa itu kurikulum merdeka dan apa saja yang perlu dikembangkan dalam kurikulum merdeka pendidikan kesetaraan tersebut. Oleh karena itu kami merencanakan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada delapan PKBM dan satu SKB di Kabupaten Buleleng, dan pada saat pelaksanaannya mengundang

perwakilan tutor dan ketua PKBM dalam menyusun kurikulum merdeka, serta kedepannya perwakilan tersebut mampu mengimbaskan di satuan pendidikan kesetaraannya. Oleh karena itu, ditawarkan **Pendampingan Penyusunan Kurikulum Merdeka Untuk Pendidikan Kesetaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kabupaten Buleleng** yang akan berlokasi di PKBM Widya Aksara Buleleng yang beralamat di Desa Tigawasa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

METODE

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan di depan adalah metode pendidikan-pelatihan dan pendampingan serta workshop dalam bentuk ceramah-diskusi. Sasaran P2M ini adalah tutor Pendidikan kesetaraan PKBM di Kabupaten Buleleng. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket kepada peserta P2M. Selanjutnya dievaluasi keberlangsungan dan kebermanfaatannya berdasarkan tujuan P2M. Peserta menyusun kurikulum merdeka Pendidikan kesetaraan kemudian akan diterapkan pada satuan Pendidikan atau PKBM masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pendampingan penyusunan asesmen ini bertujuan secara umum menghasilkan draf kurikulum merdeka yang selanjutnya bisa diterapkan pada masing-masing PKBM.. Hasil dari PKM ini adalah pertama, tutor pendidikan kesetaraan memahami dan mampu menyusun kurikulum merdeka pada pendidikan kesetaraan, kedua menghasilkan draf kurikulum pendidikan kesetaraan. Kedua tujuan tersebut sudah tercapai dengan baik dan para tutor pendidikan kesetaraan sudah memahami dan sudah menghasilkan kurikulum merdeka Pendidikan kesetaraan. Berikut adalah contoh hasil menyusun struktur kurikulum merdeka Pendidikan kesetaraan.

Tabel 1. Contoh Struktur Pendidikan Kesetaraan Program Setara SD-SMP (Paket AB)

Struktur Kurikulum Program Paket A				
Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 SKK = 1 JP tatap muka / 2 JP tutorial / 3 JP kegiatan mandiri				
Mata Pelajaran / Program Pemberdayaan dan Keterampilan	Bobot SKK Per Minggu (Tahun)			Total SKK
	Fase A (Kelas 1-2)	Fase B (Kelas 3-4)	Fase C (Kelas 5-6)	
Kelompok Mata Pelajaran Umum				
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*				
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*				
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*				
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*				
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*				
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*				
Pendidikan Pancasila	57 (2.052)	60 (2.160)	64 (2.304)	181 (6.516)
Bahasa Indonesia				
Matematika				
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial				
PJOK				
Seni Budaya				
Bahasa Inggris**				
Muatan Lokal**				
Kelompok Pemberdayaan dan Keterampilan Berbasis Profil Pelajar Pancasila				
Pemberdayaan	8 (288)	12 (432)	18 (648)	38 (1.368)
Keterampilan				
Total***:	65 (2.340)	72 (2.592)	82 (2.952)	219 (7.884)

Keterangan:

- * Diikuti peserta didik sesuai agama masing-masing.
- ** Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.
- *** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.



Keterangan:

- * Diikuti peserta didik sesuai agama masing-masing.
- ** Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.
- *** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.



Halaman 3 / 7

Tabel 2. Contoh Struktur Kurikulum Pendidikan Kesetaraan Program Setara SMA (Paket C)

Struktur Kurikulum Program Paket C			
Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 SKK = 1 JP tatap muka / 2 JP tutorial / 3 JP kegiatan mandiri			
Mata Pelajaran / Program PEMBERDAYAAN dan Keterampilan	Bobot SKK Per Minggu (Tahun)		Total SKK
	Fase E (Kelas 10)	Fase F (Kelas 11-12)	
A. Kelompok Mata Pelajaran Umum			
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Agama Konghucu dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Pancasila			
Bahasa Indonesia	20 (720)	27 (972)	47 (1.692)
Matematika			
Bahasa Inggris			
Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Biologi, Kimia)**			
Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Ekonomi, Geografi, Sosiologi)**			
Sejarah***			
PJOK			
Seni			

Keterangan:

- * Diikuti peserta didik sesuai agama masing-masing.
- ** Diberikan pada kelas 10 (Fase E)
- *** Diberikan pada kelas 11 dan 12 (Fase F)

Keterangan:

- **** Paling banyak 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.
- ***** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Pembahasan

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum program paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA. Sejak awal kehadirannya di kancah pembangunan pendidikan di tanah air, fungsi pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan nonformal adalah

mengembangkan potensi peserta didik (warga belajar) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Struktur Kurikulum Merdeka Program Kejar Paket A/B/C ini tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Nomor 56](#)

Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Di dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan

Struktur kurikulum pendidikan kesetaraan terdiri dari mata pelajaran kelompok umum dan kelompok pemberdayaan, serta keterampilan berbasis Profil Pelajar Pancasila. Kelompok umum memuat mata pelajaran yang disusun mengacu pada standar nasional pendidikan dan sesuai dengan jenjang pendidikan formal, serta merupakan mata pelajaran yang wajib diberikan untuk semua peserta didik. Sementara itu, kelompok pemberdayaan dan keterampilan berbasis Profil Pelajar Pancasila mencakup keterampilan okupasional, fungsional, vokasional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan kesetaraan, serta berbasis Profil Pelajar Pancasila. Pemberdayaan dan keterampilan sebagaimana dimaksud dijelaskan sebagai berikut.

a. Pemberdayaan memuat kompetensi untuk menumbuhkan keberdayaan, harga diri, percaya diri, sehingga peserta didik mampu mandiri dan berkreasi dalam kehidupan bermasyarakat. Materi-materi untuk mencapai kompetensi dapat meliputi pengembangan diri dan pengembangan kapasitas untuk mendukung keterampilan yang dipilih peserta didik.

b. Keterampilan diberikan dengan memperhatikan variasi potensi sumber daya daerah yang ada, kebutuhan peserta didik, dan peluang kesempatan kerja yang tersedia, sehingga peserta didik mampu melakukan aktualisasi kemandirian, otonomi,kebebasan, dan kreativitas dalam berkarya untuk mengisi ruang publik secara produktif.

Muatan belajar program pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam Satuan Kredit Kompetensi (SKK), yang menunjukkan bobot kompetensi

yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktik keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri. 1 SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam pembelajaran tatap muka, atau 2 jam pembelajaran tutorial, atau 3 jam pembelajaran kegiatan mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. 1 jam pembelajaran setara dengan 35 menit untuk Program Paket A, 40 menit untuk Program Paket B, dan 45 menit untuk Program Paket C.

Berikut akan disajikan beberapa dokumentasi kegiatan pengabdian.



Gambar 1 Bersama Tutor Pendidikan Kesetaraan



Gambar 2. Pembukaan PKM



Gambar 3 Pendampingan menyusun kurikulum Pendidikan Kesetaraan



Gambar 4. salah satu tutor presentasi



Gambar 5. Refleksi di PKBM Widya Aksara terkait kendala yang dihadapi Ketika Menyusun kurikulum merdeka

professions of the ESC. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, June 2015; vol. 14, 3: pp. 190-197., first published on February 23, 2015

Depdiknas. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi (SI) untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. Jakarta: Depdiknas.

Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020.

Robin Lake, Lynn Olson, (2020). *Learning as We Go: Principles for Effective Assessment During the COVID-19 Pandemic*.

<https://www.crpe.org/publications/learning-we-go-principles-effective-assessment-during-covid-19-pandem>

SIMPULAN

Pendampingan penyusunan kurikulum Pendidikan Kesetaraan ini bertujuan menguatkan dan menghasilkan draf kurikulum dan selanjutnya diterapkan pada satuan Pendidikan kesetaraan atau PKBM masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

Amaya, J., Peeters, D., Uribe, P. dan Valenzuela, J. P. 2020. Optimization modeling for resource allocation in the chilean public education system. *International Regional Science Review*. April 2016; vol. 39, 2: pp. 155-176., first published on February 24, 2015.

Astin, F., Carroll, D. L., Ruppard, T., Uchmanowicz, I., Hinterbuchner, L., Kletsios, E., Serafin, A. dan Ketchell, A. 2015. A core curriculum for the continuing professional development of nurses: developed by the education committee on behalf of the council on cardiovascular nursing and allied